

OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

Nabila Maharani

NPP. 29.0567

Asdaf Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

Program Studi Keuangan Publik

Email : maharaninabila8@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced related to the phenomenon of fixed asset administration which has always been a finding of the BPK that can affect the quality of regional financial reporting. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the optimization of fixed asset administration on local government financial statements in order to maintain the predicate of WTP opinion in East Lampung Regency, Lampung Province. **Methods:** The method used in this research is a qualitative descriptive method with an inductive approach where the author tries to describe and analyze the actual situation at the research site. **Results/Findings:** The results show that the implementation of optimizing fixed asset administration on local government financial reports in order to maintain the WTP opinion predicate has been carried out well and maximally, but there are still several inhibiting factors, among others, such as the process of implementing the reconciliation of asset reports on monthly mutations that are hampered and personal problems regarding great responsibility while the rewards are not comparable and less attractive. **Conclusion:** The optimization of fixed asset administration in East Lampung Regency has been carried out properly and in accordance with applicable rules and regulations, and is almost close to the maximum word. As for the things that are still felt to be an obstacle that results in delays in the process and optimization of fixed asset administration at BPKAD, East Lampung Regency.

Keywords: Fixed Assets, Opinion, Optimization, Administration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami terkait fenomena penatausahaan aset tetap yang selalu menjadi temuan BPK yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif

dengan pendekatan induktif dimana penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengoptimalan penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP sudah baik dan maksimal dilakukan, namun masih ada beberapa faktor penghambat antara lain, seperti Proses pelaksanaan rekonsiliasi laporan aset atas mutasi perbulan yang terhambat dan adanya permasalahan personal mengenai tanggung jawab yang besar sedangkan *reward* yang tidak sebanding dan kurang menarik. **Kesimpulan:** Pelaksanaan optimalisasi penatausahaan aset tetap di Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan hampir mendekati kata maksimal. Adapun hal-hal yang masih dirasa menjadi suatu kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses dan optimalisasi penatausahaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur.

Kata Kunci : Aset Tetap, Opini, Optimalisasi, Penatausahaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mekanisme pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan suatu babak baru yang menyatakan tentang sifat mandiri daerah atau biasa disebut dengan istilah otonomi daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah merubah berbagai kebijakan. Dikarenakan perkembangan yang mengalami ketidaksesuaian dan juga tuntutan yang dilakukan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta ketatanegaraan. Pada masa sekarang ini, Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih tertuju pada upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut diwujudkan dengan upaya peningkatan dalam hal pelayanan, upaya pemberdayaan, serta upaya untuk meningkatkan daya saing daerah. Mengenai urusan pemerintahan, sebenarnya esensi yang dirasakan perihal otonomi daerah lebih mengarah kepada pemberian kewenangan yang ditujukan kepada kepemimpinan dan kewenangan suatu daerah. Secara umum menurut Sabir dkk., (2017: 64) dalam aturan yang jelas yakni Undang-Undang otonomi daerah sepenuhnya diberikan kepada rakyat dalam rangka pengaturan yang menyangkut tentang urusan pemerintah daerah yang berasal dari pusat lalu diberi kewenangan ke daerah atau biasa disebut dengan desentralisasi. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga kepala daerah serta bantuan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait penyerahan Urusan pemerintahan juga menuntut dalam hal pengaturan dan pengurusan yang termasuk juga didalamnya terdapat pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pengelolaan keuangan disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan sPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni suatu kegiatan tata usaha dalam tata kelola keuangan, pelaporan keuangan, tanggung jawab akan hasil serta pengawasan keuangan dalam keuangan daerah. Pengelolaan keuangan dasarnya harus berpedoman pada penata kelolaan pemerintah yang baik (*good government*) dimana hal ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi tahap pelaporan baik pada pusat maupun daerah, yang memungkinkan memberikan kemudahan dalam akses informasi mengenai *output* penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka dari itu kriteria karakteristik dari kualitatif laporan keuangan harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai sistem penyelenggaraan tata kelola daerah. Hal ini dijelaskan dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang membahas perihal standarisasi akuntansi dalam lingkup pemerintahan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kondisi pandemi yang merajalela, berdasar pada informasi yang diberikan kepala bidang aset BPKAD Kabupaten Lampung Timur, selain kebijakan atas perubahan masa manfaat Aset Tetap atas kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan, juga terdapat beberapa kebijakan yang berpengaruh secara signifikan pada penyusunan Neraca khususnya pada barang dan juga aset yang bersifat tetap dan perhitungan dengan melakukan pemetaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi barang, juga dilaksanakan reklasifikasi antar akun pada pencatatan Aset Tetap pada buku inventaris BMD, serta mutasi Aset Tetap antar OPD terhadap Aset Tetap yang dikuasai dan menjadi kewenangannya agar sesuai dengan yang tercatat pada buku inventaris masing-masing OPD. Juga terdapat penghapusan Aset Tetap baik untuk dihibahkan maupun untuk dimusnahkan dan dijual. Kabupaten Lampung Timur pada Tahun Anggaran 2020 menerima hibah Tanah dari DJKN berupa tanah ex kuburan cina sebesar Rp22.990.000,00 dan hibah Tanah dari Masyarakat kepada Dinas Perikanan sebesar Rp640.000,00. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur juga menghapuskan tanah Bangunan Kantor pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atas hibah kepada masyarakat Desa Sekampung Udik serta melakukan koreksi /penghapusan atas 6 (enam) bidang tanah milik Kementerian Kehutanan yang selama ini dicatat dalam buku induk inventaris Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Perubahan masa manfaat dari masing-masing aset terutama dalam aset yang berbentuk Gedung dan bangunan, jembatan, peralatan dan mesin, irigasi dan jalan jarngan dan jalan jaringan, menyebabkan terjadinya perubahan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang aset mengatakan bahwa Perubahan ini mengakibatkan dilakukannya koreksi dan penyajian kembali atas penyajian saldo awal akumulasi penyusutan per 1 Januari 2020 pada Neraca. Hal ini merupakan kelanjutan dari proses kapitalisasi aset yang telah dilakukan di tahun 2019 dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2020 yang mengatur pasal penyusutan barang milik daerah atau aset daerah berupa aset tetap.

Permasalahan lainnya ditengah pandemi sekarang ini, terkendala dalam proses pelaksanaan rekonsiliasi laporan aset atas mutasi perbulan terhambat dikarenakan pengurangan proses tatap muka, selanjutnya mengenai Proses pelaksanaan peninjauan lapangan guna melengkapi dokumen pendaftaran sertifikasi tanah dan pengurusan IMB juga terkendala dikarenakan pandemi *covid-19*, serta Proses pelaksanaan pengamanan, penertiban dan pengawasan fisik aset yang terkendala karena pandemi *covid-19*. Mengenai penyajian laporan pertanggungjawaban, dalam penyajian laporan harus diperhatikan kesesuaian pelaporannya. Seperti pemeriksaan kembali pencatatan tata usaha aset agar sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan supaya tidak terjadi salah saji material atas pelaporannya. Predikat WTP dimaksudkan bahwa bukti audit yang telah terkumpul menunjukkan bukti pemerintah daerah sudah menerapkan pedoman ketentuan akuntansi yang berlaku. Jika dalam pelaporan ditemukan suatu kesalahan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi secara material.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Fenny Alfianti, 2015 yang berjudul Optimalisasi Penilaian Aset tetap dalam mewujudkan wajar tanpa pengecualian (Studi pada DPKAD Kabupaten Bangka Selatan). Hasil penelitian hasil penelitian menyebutkan bahwa belum optimalnya pengelolaan aset namun sudah terdapat upaya DPKAD dalam mewujudkan Opini Wajar Tanpa pengecualian dalam optimalisasi aset tetap di Kabupaten Bangka

Selatan. Penelitian kedua, yaitu penelitian Fitria Ningrum Sayekti, 2017 yang berjudul Penerapan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat). Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan sistem tata kelola berpengaruh positif terhadap kewajaran pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ketiga yaitu Mambang Fadli, 2018 yang berjudul Analisis Pengelola Barang Milik Daerah Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset sudah mengacu pada PERMENDAGRI NO. 19 Tahun 2016 dan PERDA Kotawaringin Timur No. 4 tahun 2010, namun keseluruhan belum maksimal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini menggunakan Teori Moermahadi (2017: 112) yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Serta fokus penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang fokus penelitian ini yakni untuk optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Hambatan dan upaya yang ditemukan optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP.

II. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. menggunakan Teori Moermahadi (2017: 112) yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pada penentuan informan digunakan metode *purposive sampling*. Penulis menggunakan teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjudul optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. menggunakan Teori Moermahadi (2017: 112) yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

3.1 Pembukuan

Tabel 1

Indikator Inventarisasi dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Atas LKPD

No.	Pernyataan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Pengguna/kuasa pengguna barang telah membuat KIB, KIR, dan Buku Inventaris (BI)	Sangat Baik
2.	Melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar pengguna barang	Sangat Baik
3.	Melakukan penghimpunan barang pengguna dan melakukan penyusunan daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan tersebut	Sangat Baik
4.	Melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan pengelompokan dan kodifikasi	Sangat Baik
5.	Kegiatan pembukuan dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya	Sangat Baik
6.	Kegiatan pembukuan dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Penulis, 2022

Berdasarkan pada tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan pembukuan dalam rangka pengoptimalan penatausahaan aset tetap atas LKPD terlihat bahwa pada kegiatan pembukuan telah dilaksanakan dengan sangat baik seperti halnya pada Pengguna/kuasa pengguna barang yang telah membuat KIB, KIR, dan Buku Inventaris (BI), dan lancarnya kegiatan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar pengguna barang, selanjutnya bagian pendaftaran dan pencatatan yang telah disesuaikan dengan pengelompokkan dan kodifikasinya, selanjutnya dalam hal Kegiatan pembukuan dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya, serta dalam kegiatan pembukuan di BPKAD Kabupaten Lampung Timur ini telah berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. pembukuan ini telah berjalan dengan semestinya dan belum ditemukannya adanya hambatan-hambatan yang signifikan atau berpengaruh dalam kegiatan pembukuan ini, sehingga dalam hal ini pada variabel pembukuan dapat dikatakan sangat baik pengelolaannya khususnya dalam penatausahaan aset tetap nya yang mana diharapkan dapat mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

3.2 Inventarisasi

Tabel 2

Indikator Inventarisasi dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Atas LKPD

No	Pernyataan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Melakukan kegiatan pencatatan seluruh aset yang telah dimutasi atau dihapuskan	Sangat Baik
2.	Kegiatan inventarisasi berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilaksanakan rutin setiap tahun	Sangat Baik
3.	Pelaporan kepada pengelola selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan	Sangat Baik
4.	Kegiatan inventarisasi pada pengguna dilakukan periodic secara rutin paling lambat 5 (lima) tahun	Sangat Baik
5.	Kegiatan inventarisasi dilakukan secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya	Sangat Baik
6.	Kegiatan inventarisasi dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Penulis, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas, berdasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi didapatkan hasil yang mana pada inventarisasi ini BPKAD telah melakukan kegiatan pencatatan seluruh aset yang telah dimutasi atau dihapuskan dengan sangat baik, dan Kegiatan inventarisasi berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilaksanakan rutin setiap tahun, Kegiatan inventarisasi pada pengguna dilakukan periodik secara rutin paling lambat 5 (lima) tahun, serta kegiatan inventarisasi pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara benar dan teratur setiap bulan dan tahunnya. salah satu kegiatan dari penatausahaan aset yaitu inventarisasi pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur terlihat telah maksimal dalam pelaksanaannya dan sudah tercover dengan baik dan hingga saat ini belum ditemukannya adanya hambatan-hambatan yang signifikan atau berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi sehingga pengoptimalan penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan daerah dalam rangka mempethankan predikat opini wajar tanpa pengecualian di BPKAD Kabupaten Lampung Timur dapat terwujud secara optimal.

3.3 Pelaporan

Tabel 3

Indikator Pelaporan dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Atas LKPD

No.	Pernyataan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Kuasa atau pengguna barang menyusun Laporan Pengguna Barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan	Sangat Baik
2.	Melakukan pengimpunan seluruh laporan pengguna barang tahunan dan 5 (lima) tahunan	Sangat Baik
3.	Melaporkan mutasi atas aset tetap yang dilaporkan setiap semester	Sangat Baik
4.	Melaporkan inventarisasi barang mencantumkan jenis, merk, type, dan nilai barang	Sangat Baik
5.	Kegiatan pelaporan dikerjakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Penulis, 2022

kegiatan pelaporan pada penatausahaan aset tetap ini Kuasa atau pengguna barang rutin melakukan penyusunan Laporan Pengguna Barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan dan juga rutin dalam hal melakukan pengimpunan seluruh laporan pengguna barang tahunan dan 5 (lima) tahunan, dan dalam hal pelaporan mutasi atas aset tetap telah dilaporkan setiap semester secara rutin,serta seluruh kegiatan pelaporan ini sudah sesuai dengan payung hukum atau ketentuan yang berlaku dalam kegiatannya.

3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Tabel 4

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap

No.	Pernyataan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi	Sangat Baik
2.	Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan yang berguna dalam pengambilan keputusan.	Sangat Baik
3.	Transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material	Sangat Baik
4.	Transaksi yang disajikan dalam Laporan keuangan tergambar dengan jujur	Sangat Baik
5.	Informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode silam	Sangat Baik

(1)	(2)	(3)
6.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dimasa selanjutnya	Sangat Baik
7.	Laporan keuangan yang disusun tidak membingungkan dan sesuai	Sangat Baik
8.	Laporan keuangan disusun dengan kenyataan dan sesuai fakta	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas, berdasar pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Lampung Timur diperoleh hasil yang mana pada karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Lampung Timur ini seperti Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu sesuai periode akuntansi, Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan yang berguna dalam pengambilan keputusan, Transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material, Transaksi yang disajikan dalam Laporan keuangan tergambar dengan jujur, Informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode silam, Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dimasa selanjutnya, Laporan keuangan yang disusun tidak membingungkan dan sesuai, serta Laporan keuangan disusun dengan kenyataan dan sesuai fakta. bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur telah terpenuhi dan berjalan secara maksimal. Dan juga dilihat dari hasil persentase penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) baik itu provinsi inspektorat maupun dari badan pemeriksa keuangan (BPK) telah menunjukkan indikasi laporan yang baik.

3.5 Kriteria Kewajaran Informasi Laporan Keuangan

Tabel 5
Indikator Kriteria Kewajaran Informasi Laporan Keuangan Dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Atas LKPD

No.	Pernyataan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	Sangat Baik
2.	Data lengkap dan pengungkapannya cukup	Sangat Baik
3.	Pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Sangat Baik
4.	Adanya pengawasan intern	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Penulis, 2022

Berdasarkan pada tabel 5 berdasar pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Lampung Timur diperoleh hasil yang mana pada hasil kriteria kewajaran informasi laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Lampung Timur didapatkan Pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, Data lengkap dan pengungkapannya cukup, Pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya pengawasan intern. secara garis besar kriteria kewajaran informasi laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Lampung Timur telah sesuai atau mendekati

sempurna dan bisa dikatakan wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan keterangan dibawah ambang materialitas kewajaran penyajian laporan aset. Dengan demikian optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian telah mendekati kata maksimal dalam pelaksanaannya sebagaimana dilihat dari beberapa aspek penatausahaan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan juga bagian kewajaran laporan keuangannya. Namun disisi lain pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya dalam membarengi dengan peningkatan potensi PAD.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Persamaan temuan penelitian Fenny Alfianti, 2015 dari penelitian ini yaitu Optimalisasi aset tetap dan Metode penelitian kualitatif, serta menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan aset namun sudah terdapat upaya DPKAD dalam mewujudkan Opini Wajar Tanpa pengecualian dalam optimalisasi aset tetap di Kabupaten Bangka Selatan. Temuan penelitian Fitria Ningrum Sayekti, 2017 yaitu Penerapan system pengelolaan barang milik daerah dan Metode penelitian kuantitatif, serta penerapan sistem tata kelola berpengaruh positif terhadap kewajaran pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan temuan penelitian Mambang Fadli, 2018 yaitu Analisis pengelolaan Barang milik Daerah dan Metode penelitian Kualitatif, serta pengelolaan aset sudah mengacu pada PERMENDAGRI NO. 19 Tahun 2016 dan PERDA Kotawaringin Timur No. 4 tahun 2010, namun keseluruhan belum maksimal.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan optimalisasi penatausahaan aset tetap di Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan hampir mendekati kata maksimal. Adapun hal-hal yang masih dirasa menjadi suatu kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses dan optimalisasi penatausahaan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh BPKAD dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung adalah Proses pelaksanaan rekonsiliasi laporan aset atas mutasi perbulan yang terhambat dengan alasan pandemic Covid-19 Adanya permasalahan personal mengenai tanggung jawab yang besar sedangkan reward yang tidak sebanding dan kurang menarik Upaya yang dilakukan oleh BPKAD untuk mengatasi Hambatan Guna Meningkatkan Penatausahaan Aset Tetap Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung antara Melakukan pemaksimalan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan aset pertanggal 10 pada tiap bulan berjalan bersama seluruh OPD, Mengadakan pelatihan dan gathering dalam rangka memaksimalkan kedekatan personal antar pemangku kepentingan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan hasil optimalisasi penatausahaan aset tetap atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan predikat opini WTP di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan serta seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bruce L.B. 2001. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Allyn and. Boston.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Los Angeles: SAGE Publik.
- Djanegara, Moermahadi. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press.
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Cet. 9. Yogyakarta: Liberty.
- Halim, Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihyaul, Ulum. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. 2002. *Prinsip Dasar Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah*. Yogyakarta: FE-UGM.
- Moleong, J Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosda.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Ind.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. United State of America: Person Edu.
- Poerwandari, E.K. 2007. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Universitas Jakarta.
- Rinaldi, Sony Faisal. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Statistik*. Jakarta: Pusat Pendidikan.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silalahi, Uber. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adi.
- Sinurat, Marja. 2015. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Pustaka Radar.
- Siregar. 2016. *Otonomi Dan Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sudjana. 2019. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research And Development/ R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jjakarta: PPM Manajemen.
- , 2015. *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilfo.

- Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Albugis, Febriana F. 2016. "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA* 4.
- Ariani, Anita. 2017. "Optimalisasi Manajemen Piutang Pada Ud". Surabaya: Mitrasantika Furniture.
- Darbianda, Rezki. 2018. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang".
- Darmanto, Aresta. 2016. "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur" .*eJournal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 1.
- Huda, Mohammad Nurul. 2018. "Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa".*Ta'dibi* VI, no. 52–54.
- Liddinillah, Alfyanul. 2017. *Study Komparatif Program Acara 'Mutiara Hati' JTV Dan 'Risalah Hati' NET TV*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Panggabean, Fitri Yani. 2019. "Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit". *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 5, no. 2.
- Nurhadiansyah, Nelson. 2019. "Proses Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Lampung". *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains* 04, no. 02.
- Tahinakis, P., & Samarinas, M. 2016. "The Incremental Information Content of Audit Opinion". *Journal of Applied Accounting Research* 17, no. 2.
- Wardhana, Didin. 2018. "Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) Di Kota Bandung". Bandung: *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, no. 1.
- Letece, Yokpedi. 2017. "Optimalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Manado: *Jurnal Unsrat*".

